

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemodelan dan analisis data panel terkait pengaruh Dana Desa, tingkat partisipasi publik, infrastruktur energi, serta capaian pendidikan terhadap disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2015–2025, dirumuskan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa

Penyaluran Dana Desa terbukti secara konsisten menekan ketimpangan ekonomi wilayah secara signifikan sepanjang 2015–2025. Efektivitas penyerapan anggaran ini mempercepat pemerataan sarana dan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga mampu memperkecil kesenjangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Barat.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif warga yang diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berkontribusi secara nyata dan signifikan dalam mereduksi jurang pendapatan. Luasnya partisipasi tenaga kerja menciptakan iklim perekonomian yang produktif sekaligus mendorong distribusi penghasilan masyarakat yang lebih merata.

3. Ketersediaan Infrastruktur Energi

Pengembangan sarana energi dan perluasan jangkauan aliran listrik berdampak positif terhadap penurunan ketimpangan ekonomi antardaerah secara signifikan (2015–2025). Kecukupan daya energi meningkatkan efisiensi operasional sektor usaha dan produksi, yang pada akhirnya memangkas ketimpangan antar kabupaten/kota.

4. Kualitas Pembangunan Pendidikan

Peningkatan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berbanding terbalik secara signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan. Penguatan modal manusia (*human capital*) ini memperbesar peluang angkatan kerja untuk memasuki sektor publik maupun privat bernilai tambah tinggi, sehingga efektif memperkecil kesenjangan kesejahteraan.

5. Pengujian Simultan (Uji F)

Secara bersama-sama, variabel Dana Desa, partisipasi angkatan kerja, ketersediaan energi, dan tingkat pendidikan terbukti mempengaruhi dinamika ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (2015–2025). Temuan ini menegaskan bahwa keempat faktor tersebut merupakan instrumen terintegrasi yang saling menopang dalam mendorong konvergensi ekonomi daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan untuk memperkuat efisiensi tata kelola Dana Desa melalui reorientasi alokasi pada program-program berbasis stimulasi ekonomi produktif. Upaya ini dapat diimplementasikan via penguatan usaha warga, revitalisasi infrastruktur ekonomi tingkat nagari/desa, pendampingan UMKM, serta peningkatan mutu layanan publik lokal guna mengakselerasi pemerataan pembangunan dan meminimalkan disparitas pendapatan antar kawasan.

2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Sektor Ekonomi

Pemerintah daerah perlu merumuskan intervensi strategis guna mendongkrak partisipasi publik dalam kegiatan ekonomi riil. Langkah tersebut dapat ditempuh melalui pembukaan akses lapangan kerja baru, penyelenggaraan pelatihan keterampilan terapan, inkubasi kewirausahaan, serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat produktif. Ekspansi keterlibatan angkatan kerja ini diyakini mampu memperluas pemerataan distribusi penghasilan sekaligus menekan kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota.

3. Pemerataan dan Penguatan Infrastruktur Energi

Pemerintah diharapkan mengambil langkah proaktif dalam mempercepat pemerataan pasokan energi, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan listrik dan sarana pendukungnya. Penjaminan aksesibilitas energi yang andal sangat krusial untuk menopang iklim usaha lokal, mendongkrak

efisiensi produksi masyarakat, serta mereduksi ketimpangan pembangunan spasial secara berkelanjutan.

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diimbau untuk mengoptimalkan sektor pendidikan melalui perluasan keterjangkauan dan perbaikan mutu layanan, pemenuhan fasilitas penunjang yang layak, alokasi beasiswa bagi kelompok prasejahtera, serta penyelenggaraan pelatihan profesionalisme pendidik. Langkah-langkah strategis ini krusial guna memperkuat kapasitas modal manusia sekaligus menstimulasi pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat.

5. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan beragam intervensi pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah, mencakup program pendidikan, pelatihan vokasi, pemberdayaan kapasitas ekonomi, hingga pemanfaatan fasilitas publik yang tersedia. Keterlibatan aktif warga dalam iklim pembangunan akan mempercepat peningkatan standar hidup dan memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.

6. Peneliti Selanjutnya

Studi berikutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan variabel independen yang relevan terhadap dinamika ketimpangan ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, arus investasi, alokasi belanja daerah, hingga kontribusi struktur sektor perekonomian.